

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN NO.36 TAHUN 2008 DAN PSAK NO.16 TAHUN 2009 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KAMPAR

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



DI SUSUN OLEH:

FITRI HERLINDA YANTI

NIM : 10973005827

**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN NO.36 TAHUN 2008 DAN PSAK NO.16 TAHUN 2009 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KAMPAR

Oleh : Fitri Herlinda Yanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan PSAK No.16 Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis apakah ada perbandingan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan PSAK No.16 Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang relevan selanjutnya diambil satu kesimpulan. Data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak perusahaan dalam bentuk jadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan tarif penyusutan aktiva tetap tidak sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 antara lain perbedaan biaya penyusutan Kipas Angin CMC Uchiba sebesar Rp.56.250 dan AC Panasonic 1 PK sebesar Rp.437.500. Selanjutnya Honda RX king sebesar Rp.812.500 dan Honda Jupiter Z sebesar Rp.2.206.000. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi biaya penyusutan, penghasilan kena pajak dan pajak terutang perusahaan. Selain itu penyajian aktiva tetap pada laporan neraca harus dipisahkan. Perusahaan seharusnya melaporkan nilai setiap jenis aktiva dikurangi akumulasi penyusutan. Sehingga penyajian tersebut tidak akan menimbulkan kekeliruan bagi para pembaca untuk mengetahui jenis-jenis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan nilai buku setiap jenis aktiva tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perusahaan belum menerapkan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Metode yang digunakan sudah tepat yaitu metode garis lurus, namun terdapat kesalahan dalam penentuan kelompok aktiva tetap dan tarif penyusutan yang setelah dikoreksi menimbulkan penurunan dan kenaikan biaya penyusutan sehingga berdampak pada laba sebelum pajak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar.

Kata kunci : Aset Tetap, Penyusutan, Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008, dan PSAK 16 Tahun 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul ***“Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan PSAK No.16 Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar ”.***

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Deman Huri, Ibunda Zamrida, Kakak Yetrita, Yesi Hayati SE, Tuti Hayati AMa, serta Adinda Muhammad Jamal Wahdi beserta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta doa bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan S1 di UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.
3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec beserta Staf UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Dony Martias, SE, MM, Ketua Jurusan Akuntansi SI Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak selaku Penasehat Akademis, yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama Perkuliahan.
6. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak, Sekretaris Jurusan Akuntansi SI atas perhatiannya.
7. Bapak Khairil Hendri, SE, Msi, Ak selaku pembimbing yang telah banyak memberi bantuan dan memberi arahan serta bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran, dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Hesty Wulandari, SE, MSc, Ak selaku dosen konsultasi yang telah banyak memberi bimbingan dan bantuan dalam penyusunan proposal.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmunya selama Perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam membuat skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Akuntansi A Angkatan 2009, dan lokal Konsentrasi Perpajakan, anak-anak kost GMP 1 (Wirda, Rizqa, Juliani, Juliana, Intan, Lia, dan Dek Nurul), dan masih banyak lagi yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
12. Spesial buat seseorang yang tersayang Nopri Zaprino Yunanto, yang selalu menemani dan mendampingi penulis baik dalam keadaan susah maupun senang serta memotivasi kepada penulis selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

13.Semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah ini.

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Mei 2013

Peneliti

FITRI HERLINDA YANTI

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat penelitian.....	7
1.5. Metodologi Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Pajak	11
2.1.1. Defenisi Pajak.....	11
2.1.2. Pengelompokkan Pajak.....	12
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.2. Aktiva Tetap.....	13
2.2.1. Pengertian Aktiva Tetap	13
2.2.2. Klasifikasi Aktiva Tetap	15
2.3. Penyusutan Aktiva Tetap	16
2.3.1. Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Komersial	16

2.3.2. Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan	23
2.4. Perlakuan Pajak Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali	
Aktiva.....	33
2.5. Perbedaan Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan	34
2.6. Penyajian Aktiva Tetap Dalam Neraca	37
2.7. Koreksi terhadap Perhitungan Laba Komersial dan Laba	
Fiskal karena Perbedaan Penerapan Akuntansi	
Penyusutan Aktiva Tetap	39
2.7.1. Koreksi Fiskal	39
2.7.2. Faktor-Faktor Penyebab Koreksi Fiskal	40
2.7.3. Jenis-Jenis Koreksi Fiskal.....	41
2.7.4. Koreksi Fiskal Positif.....	42
2.7.5. Koreksi Fiskal Negatif	43
2.8 Pajak Menurut Pandangan Islam.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Perusahaan.....	47
3.2. Visi, Misi dan Motto Perusahaan	48
3.3. Aktivitas Perusahaan	48
3.4. Struktur Organisasi	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengelompokkan Harta Berwujud	53
4.2. Lamanya Penyusutan.....	58
4.3. Perbandingan Penyusutan Aktiva	59

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....65

5.2. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajer perusahaan, pemegang saham, kreditur, pemerintah dan karyawan dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai keadaan dan perkembangan serta sebagai dasar untuk menentukan sikap sesuai dengan jenis kepentingannya. Kepentingan Pemakai laporan keuangan biasanya ingin dapat membandingkan prestasi antar perusahaan dalam kegiatan usaha sejenis (dalam industri yang sama), dan juga membandingkan kinerja perusahaan yang sama (perusahaan itu sendiri) untuk periode laporan yang berbeda.

Sebuah perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasi selalu memerlukan berbagai peralatan, perlengkapan, dan sarana-sarana lainnya, untuk menunjang kegiatan usahanya tersebut. Dalam aktiva, peralatan dan perlengkapan merupakan bagian dari aktiva tetap. Secara teoritis (Karyono, 2011:1), Aktiva tetap adalah sebuah aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasi normal perusahaan dan bukan untuk dijual serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Dalam laporan keuangan aktiva tetap disajikan di neraca di sebelah

debet secara sistematis sesuai dengan sifat permanennya yaitu dimulai dari aktiva yang paling lama umur atau masa manfaatnya sampai pada aktiva tetap yang paling singkat umurnya. Sedangkan akumulasi penyusutan aktiva tetap disajikan sebagai pengurang nilai aktiva tetap baik sendiri-sendiri atau secara keseluruhan. Menurut PSAK 16 Paragraf 30 (2009), penyajian aktiva tetap dineraca adalah : Aktiva tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Kepentingan wajib pajak dengan pemerintah berkaitan dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki pajak yang terutang atau yang dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan. Terhadap hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk mendapatkan penghasilan kena pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam Peraturan Perpajakan. Banyak pula Ketentuan Perpajakan tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan. (Muljono dan Wicaksono, 2009:59-60).

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan adalah perlakuan terhadap akuntansi aktiva tetap khususnya yang berkaitan dengan masalah penyusutan. Dalam kondisi yang seperti ini pihak manajemen memerlukan alternatif perlakuan akuntansi yang tepat agar menghasilkan informasi tentang aktiva yang akurat dan terpercaya. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini bertujuan

untuk membandingkan apakah perhitungan penyusutan aktiva tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar sesuai dengan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan PSAK No.16 Tahun 2009. Sehingga bisa diketahui penyebab dari perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal pada akuntansi aktiva tetap yang pada akhirnya berpengaruh pada jumlah yang berbeda dari laba komersial dan laba fiskal. Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan Undang-undang Perpajakan (UU No.36 tahun 2008) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, sedangkan laba komersial adalah laba yang dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial tersebut disebabkan oleh perbedaan waktu, perbedaan waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan secara fiskal, misalnya waktu pengakuan manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. (Muljono dan Wicaksono, 2009 : 61)

Akuntansi aktiva tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahan dalam menilai aktiva tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahan dalam menilai aktiva tetap berwujud dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material karena nilai investasi yang ditanamkan pada aktiva relatif besar. Mengingat pentingnya akuntansi aktiva tetap dalam laporan keuangan tersebut, maka perlakuannya harus berdasarkan pada standar akuntansi keuangan (PSAK No.16). Oleh karena itu perlu melakukan perbaikan pada akuntansi aktiva tetapnya. Aktiva tetap tersebut dalam penyajiannya pada laporan keuangan seharusnya membebaskan biaya depresiasi yang dimiliki secara

konsisten pada setiap periode dengan menggunakan metode yang dianggap sesuai untuk diterapkan, yaitu metode garis lurus untuk bangunan, peralatan dan inventaris, serta metode jumlah angka tahun untuk kendaraan dan sarana transportasi lainnya, agar diketahui nilai sisanya pada akhir periode. Menurut PSAK 16 Paragraf 64 (2009), metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus direview minimum setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang signifikan maka metode penyusutan harus dirubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar Bangkinang adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan sesuai dengan nilai-nilai atau syarat-syarat kesehatan dan bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat atau penduduk yaitu dengan cara menyalurkan air bersih kerumah penduduk, tempat usaha dan fasilitas umum yang membutuhkan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk memajukan fungsi sosial. Sistem penyaluran air bersih tersebut selain menggunakan instalasi air (pipa), juga menggunakan armada dalam bentuk mobil tangki, sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersedia jaringan instalasi perpipaannya. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan air bersih, perusahaan tersebut memiliki aktiva yang relatif banyak sehingga perlakuan akuntansinya perlu dilakukan dengan cermat.

Dari hasil pengamatan ditemukan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan aktiva tetap, antara lain :

1. Penyajian aktiva tetap dineraca yang dilakukan oleh perusahaan tidak dipisahkan. Perusahaan melaporkan nilai perolehan semua jenis aktiva tetap dikurangi akumulasi penyusutan dalam kelompok aktiva tetap. Nilai perolehan aktiva tetap sebesar Rp.6.390.596.969,64 dan akumulasi penyusutan aktiva tetap Rp.4.528.193.311,17. Penyajian tersebut akan menimbulkan kekeliruan bagi pembaca untuk mengetahui jenis-jenis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan nilai buku setiap jenis aktiva tetap tersebut.
2. Pada daftar penyusutan aktiva tetap perusahaan membeli satu unit *mobiler kantor* pada Tahun 2003 dengan harga Rp.3.491.000 dengan tarif penyusutan 25%. Masa manfaat 4 tahun dan masa pemakaian 9 tahun. Nilai buku per 31 Desember 2011 adalah Rp.330.975. Untuk aktiva tetap yang sudah habis masa manfaatnya tetapi masih digunakan dalam operasi normal perusahaan, seharusnya perusahaan menyajikan nilai buku aktiva tetap tersebut sebesar Rp.1. Jika perusahaan sudah tidak mengakuinya sebagai aset sebaiknya dihapus dari aktiva tetap, sehingga perusahaan tidak perlu lagi menghitung beban penyusutan untuk periode berjalan.
3. Perusahaan menghitung penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku yaitu UU No.10 Tahun 1994. Sedangkan sekarang Undang-undang Perpajakan yang dipakai adalah UU No.36 Tahun 2008. Hal ini menyebabkan perusahaan menggolongkan aktiva tetap tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pada saat sekarang, misalnya kipas angin CMC Uchiba dan AC

Panasonic 1 PK merupakan aktiva tetap yang termasuk kelompok II, masa manfaatnya 8 tahun, tarif penyusutannya 12,5% tetapi perusahaan menggolongkan aktiva tetap tersebut kedalam kelompok I, masa manfaatnya 4 tahun dan tarif penyusutannya 25%. Kemudian Honda RX King dan Honda Jupiter Z merupakan aktiva tetap yang tergolong kelompok I, masa manfaat 4 tahun dan tarif penyusutannya 25%, tetapi perusahaan menggolongkan ke kelompok II dengan masa manfaatnya 8 tahun dan tarif penyusutannya 12,5%.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan PSAK No.16 Tahun 2009 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar ”**

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah Ada Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap dengan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan PSAK No.16 Tahun 2009 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar ?”

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perhitungan penyusutan aktiva tetap dengan Peraturan Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No.16 Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Bagi peneliti.

Dapat menjadi bahan yang berguna bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan serta sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

2. Bagi pihak lain.

Dapat dijadikan referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis, dan dapat sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca dan peneliti yang berminat terhadap permasalahan yang sama.

3. Bagi perusahaan.

Sebagai bahan informasi tambahan bagi perusahaan dalam menjalankan dan membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.

1.5 Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di lokasi obyek penelitian yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar yang terletak di Jalan Sudirman, Bangkinang.

2. Jenis dan sumber data.

a. Jenis data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak perusahaan dalam bentuk jadi. Seperti struktur organisasi, kegiatan usaha perusahaan serta data yang mencakup pembukuan dan catatan-catatan akuntansi dan data yang berhubungan dengan perpajakan.

b. Sumber data.

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari bagian keuangan dan pembukuan berupa neraca, laporan laba rugi, daftar aktiva. Sedangkan sejarah dan struktur organisasi perusahaan didapat dari bagian administrasi umum. Serta laporan yang diperoleh dari bagian perpajakan.

3. Teknik pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dan dokumentasi. Penulis menghubungi direktur utama, bagian

keuangan, bagian perpajakan dan pembukuan secara langsung untuk dapat memperoleh dan melengkapi data pendukung lainnya.

4. Analisis Data.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang relevan selanjutnya diambil satu kesimpulan. Dengan fokus penelitian adalah neraca, laporan laba rugi, daftar aktiva tetap, kebijakan perusahaan mengenai penyusutan aktiva tetap serta penerapan aktiva tetap ditinjau dari PSAK dan Ketentuan Perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan.

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang menguraikan teori-teori mengenai penelitian yang akan diteliti.
- BAB III : Merupakan bab gambaran umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar yang meliputi sejarah singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta

Kampar, visi dan misi perusahaan dan aktivitas didalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar.

BAB IV : Merupakan gambaran dari hasil penelitian, yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan hasil.

BAB V : Merupakan penutup dari penulisan dalam penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran untuk perbaikan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pajak

2.1.1 Defenisi Pajak.

Defenisi pajak menurut Setiawan (2006:349) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Agustina dan Isnianto (2009:1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fidel (2010:4), Pajak adalah harta kekayaan yang berdasarkan Undang-undang atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi.

Dari beberapa defenisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas tanpa mendapat imbalan jasa secara langsung dari negara.

2.1.2 Pengelompokan Pajak.

Menurut Asyhadie (2008:176), pengelompokan pajak terdiri dari :

1) Menurut golongan.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya.

- a. Pajak subyektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subyeknya atau wajib pajaknya. Contohnya : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada objeknya. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya.

- a. Pajak pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Bumi Bangunan.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemungutan pajak menurut Asyhadie (2008:176-177) adalah sebagai berikut :

- a) *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak (pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (yang harus dibayar) oleh wajib pajak.
- b) *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang akan dibayar.
- c) *Withholding System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak.

2.2 Aktiva Tetap.

2.2.1 Pengertian Aktiva Tetap.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) dalam PSAK 16 Paragraf 6, Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Soemarso (2008:23), Aktiva tetap adalah aktiva yang jangka waktu pemakaiannya lama, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup besar.

Agoes (2012:102), Aset tetap adalah aset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang memiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Mulyadi (2006:209) dalam buku *Pemeriksaan Akuntan*, Aktiva berwujud adalah aktiva yang mempunyai umur lebih dari satu tahun, yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan diperoleh atau dibeli untuk dijual lagi.

Dari defisini diatas dapat dijelaskan bahwa aktiva tetap perusahaan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak dimaksud untuk dijual, jadi jika terdapat peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan untuk masa lebih dari satu tahun periode akuntansi, akan tetapi nilainya tidak material, maka peralatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap perusahaan.

Menurut Ilahi (2012:11), kategori aktiva tetap adalah sebagai berikut :

- a. Dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan.
- b. Nilainya cukup material dan bersifat relatif permanen.
- c. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.
- d. Mempunyai manfaat dan daya guna lebih dari satu tahun.
- e. Tidak diperjualbelikan dalam kegiatan perusahaan.
- f. Dapat diobservasi dengan alat perasa fisik.

2.2.2 Klasifikasi Aktiva Tetap.

Aktiva tetap yang dipergunakan dalam operasi perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Aktiva berwujud yang dibagi menjadi:
 1. Aktiva yang disusutkan, seperti gudang, mesin-mesin, dan peralatan kantor.
 2. Aktiva yang tidak dapat disusutkan seperti tanah.
- b. Aktiva tidak berwujud, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, *goodwill*, dan lain-lain.
- c. Sumber daya alam, aktiva tetap yang depleksi, misalnya tanah-tanah pertambangan.

Menurut Zaki Baridwan (2004:274), menjelaskan sebagai berikut: aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dapat mempunyai macam-macam bentuk seperti:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Mesin dan alat-alat
4. Alat-alat kerja
5. *Patterrn* dan *dies*/cetakan-cetakan
6. Perabotan dan alat-alat kantor
7. Kendaraan
8. Tempat barang yang dapat dikembalikan (*Returnable Container*)

2.3 Penyusutan Aktiva Tetap.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari aset dihentikan lebih awal ketika :

1. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset tersebut termasuk dalam kelompok aset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual; dan
2. Aset tersebut dihentikan pengakuannya pada saat:
 - a. Dilepaskan; atau
 - b. Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

2.3.1 Metode Penyusutan sesuai Ketentuan Komersial

Tujuan akuntansi komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun tidak semua informasi dapat tersedia untuk pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum laporan keuangan tersebut menggambarkan pengaruh keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak diwajibkan menyiapkan informasi non keuangan. (Waluyo, 2008:27)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) dalam PSAK 16, Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama

umur manfaatnya. Menurut PSAK 16 tersebut jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya (baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan. (Agoes, 2012:104)

Berdasarkan PSAK No.17 (2009) Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut :

1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi. (Waluyo, 2008:92)

Menurut Rudianto (2009:276), terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan setiap periodenya:

a. Harga perolehan

Adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan

b. Nilai sisa (residu)

Adalah taksiran harga jual aktiva tetap tersebut pada akhir masa manfaat aktiva tetap tersebut. Setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda satu dengan lainnya untuk jenis aktiva tetap yang sama jumlah

taksiran nilai residu juga akan sangat dipengaruhi umur ekonomisnya, inflasi nilai tukar mata uang, bidang usaha dan sebagainya.

c. Taksiran umur kegunaan

Adalah taksiran masa manfaat dari aktiva tetap tersebut. Masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut, bukan umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerja.

Untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap ke periode-periode yang memperoleh manfaat terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, metode yang digunakan hendaknya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi aktiva tersebut, metode yang baik untuk suatu perusahaan belum tentu cocok dipergunakan diperusahaan lain.

Menurut PSAK 16 Paragraf 64 (2009), menyatakan metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut.

Dalam praktik akuntansi komersial metode penyusutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Dasar waktu

a. Metode garis lurus (*Straight Line Method*).

Dalam metode ini, biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan berjalannya waktu, dalam jumlah-jumlah yang sama selama masa manfaat aset tetap berwujud tersebut.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Perhitungan}$$

Misalnya : Sebuah perusahaan membeli kendaraan dengan harga Rp.19.000.000, umur ekonomis 5 tahun. Nilai residu Rp.1.000.000. maka penyusutannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Per tahun} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Umur Penggunaan}} \\ &= \frac{\text{Rp.19.000.000} - \text{Rp.1.000.000}}{5 \text{ Tahun}} \\ &= \text{Rp.3.600.000 Per tahun} \end{aligned}$$

b. Metode pembebanan menurun.

1. Metode jumlah angka tahun (*Sum Of The Year Digit Method*).

Metode ini sering disebut metode jumlah angka tahun yang akan menghasilkan jumlah penyusutan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Penyusutan} &= \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Perhitungan Penyusutan} \\ \text{Dasar Perhitungan Penyusutan} &= \text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu} \end{aligned}$$

Tarif penyusutan ditetapkan dengan pecahan yaitu pembilang adalah angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap,

sebagai contoh 1,2,3,4,5, dan seterusnya. Sedangkan pembilang untuk tahun pertama penjumlahan angka tahun sampai dengan angka tahun terakhir. Sebagai contoh apabila masa manfaat hanya lima tahun, maka penjumlahan $(1+2+3+4+5) = 15$.

Misalnya : Sebuah perusahaan membeli kendaraan dengan harga Rp.19.000.000, umur ekonomis 5 tahun. Nilai residu Rp.1.000.000. maka penyusutannya sebagai berikut :

Jumlah Digit Tahun = $1+2+3+4+5 = 15$

Atau rumus = $\frac{n(n+1)}{2}$

Tahun	penyusutan	Akumulasi	Nilai buku
I	$5/15 \times 18.000.000 = 6.000.000$	6.000.000	13.000.000
II	$4/15 \times 18.000.000 = 4.800.000$	10.800.000	8.200.000
III	$3/15 \times 18.000.000 = 3.600.000$	14.400.000	4.600.000
IV	$2/15 \times 18.000.000 = 2.400.000$	16.800.000	2.200.000
V	$1/15 \times 18.000.000 = 1.200.000$	18.000.000	1.000.000

2. Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*Declining/Double Declining Balance Method*).

Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun, dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya dari tahun ke tahun semakin menurun. Perhitungan biaya penyusutan :

Biaya Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Perhitungan Penyusutan

Dasar Perhitungan Penyusutan = Harga Sisa Buku Awal Periode.

Misalnya : Perusahaan membeli kendaraan dengan harga
Rp.50.000.000, umur ekonomis 5 tahun,
penyusutannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan saldo menurun} = \frac{100\%}{5} = 20\%$$

$$\text{Penyusutan saldo menurun} = 20\% \times 2 = 40\%$$

Tahun	Penyusutan	Akumulasi	Nilai buku
I	40% X 50.000.000 = 20.000.000	20.000.000	30.000.000
II	40% X 30.000.000 = 12.000.000	32.000.000	18.000.000
III	40% X 18.000.000 = 7.200.000	39.200.000	10.800.000
IV	40% X 10.800.000 = 4.320.000	43.520.000	6.480.000
V	40% X 6.480.000 = 2.590.000	46.110.000	3.890.000

2) Dasar penggunaan

a. Metode jam jasa (*Service Hours Method*).

Pada metode ini besarnya penyusutan dihitung dengan mendasarkan pada teori bahwa pembelian aset tetap ditunjukkan dari jumlah jam jasa langsung dan dalam metode ini mengakui estimasi masa manfaat aset yang diukur dalam jam jasa.

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Estimated Service Life}}$$

Estimated Service Life

Misalnya : Mesin dengan harga perolehan Rp.10.000.000, memiliki nilai residu Rp.1.000.000 ditaksir umur ekonomisnya 5 tahun.
Tahun I = 1500 jam mesin, tahun II = 2000 jam mesin, tahun III = 4000 jam mesin, tahun IV = 1500 jam mesin, tahun V = 1000 jam mesin. Penyusutan mesin dihitung sbb:

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan Per jam} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran jam jasa}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 10.000.000} - \text{Rp.1.000.000}}{10.000} \\
 &= 900 \text{ Per jam}
 \end{aligned}$$

Tahun	Jam kerja mesin	Penyusutan	Akumulasi penyusutan	Nilai buku kendaraan
I	1500	1.350.000	1.350.000	8.650.000
II	2000	1.800.000	3.150.000	6.850.000
III	4000	3.600.000	6.750.000	3.250.000
IV	1500	1.350.000	8.100.000	1.900.000
V	1000	900.000	9.000.000	1.000.000

b. Metode unit produksi (*Productive Output Method*).

Dalam metode unit produksi taksiran manfaat dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Kapasitas produksi ini dapat pula dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian atau urutan kegiatan lainnya. Besarnya biaya penyusutan dapat dirumuskan:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Produk Sebenarnya}}{\text{Kapasitas Produksi}}$$

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}$$

Misalnya : Mesin dengan harga Rp.50.000.000, memiliki nilai residu Rp.5.000.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Ditaksir mesin ini dapat memproduksi 100.000 unit barang. Tahun I = 20.000 Unit, tahun II = 20.000, tahun III = 25.000 unit, tahun IV = 20.000, tahun V = 15.000 unit. Penyusutan mesin dihitung :

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan Per unit} &= \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Unit Produksi}} \\
 &= \frac{\text{Rp.50.000.000} - \text{Rp.5.000.000}}{100.000} \\
 &= 450 \text{ Per unit}
 \end{aligned}$$

Tahun	Jumlah unit produksi	Penyusutan	Akumulasi penyusutan	Nilai buku kendaraan
I	20.000	9.000.000	9.000.000	41.000.000
II	20.000	9.000.000	18.000.000	32.000.000
III	25.000	11.250.000	29.250.000	20.750.000
IV	20.000	9.000.000	38.250.000	11.750.000
V	15.000	6.750.000	45.000.000	5.000.000

3) Dasar kriteria lainnya.

Menggunakan dasar kriteria lainnya bahwa biaya penyusutan dapat dihitung dengan dasar jenis dan kelompok. Pengelompokkan ini dikenali dalam kelompok atau dalam perpajakan dikenali dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan bangunan. Ketentuan Pasal 11 Undang –undang pajak penghasilan mengelompokkan kedalam “ Bukan Bangunan” dan kelompok “Bangunan”. Akuntansi komersial mengelompokkan aset berdasarkan masa manfaat.

2.3.2 Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. (Setiawan Dan Basri, 2006: 422-423)

Undang-undang pajak penghasilan secara khusus menetapkan saat mulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Penyusutan harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut :

a. Harta/aktiva dalam pengerjaan.

Untuk harta/aktiva tetap dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi walaupun pada umumnya penyusutan atas harta/aktiva dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk harta/aktiva yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya harta/aktiva yang bersangkutan.

b. Harta/aktiva dalam usaha leasing.

Penyusutan terhadap harta/aktiva dalam usaha leasing khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi dimulai pada bulan harta tersebut disewa guna usahakan.

c. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya penyusutan baru dilakukan pada tahun harta/aktiva tersebut menghasilkan.

Untuk aset yang disusutkan harus dikelompokkan terlebih dahulu sesuai masa manfaat. Akuntansi komersial mengatur estimasi masa manfaat suatu aset yang dapat disusutkan dengan dasar pertimbangan yang biasanya pada

pengalaman dengan jenis aset yang serupa. Sedangkan ketentuan perpajakan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No.520/KMK.04/2000 Tanggal 14 Desember 2000 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.138 KMK.03/2002 Tanggal 18 April 2002. (Waluyo, 2008: 93-94)

Dalam menghitung PPh terutang, orang pribadi yang mengadakan pembukuan dan perusahaan mendasarkan diri dari laporan keuangan yang dibuat secara komersial. Dari laporan keuangan komersial tersebut selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan WP secara komersial menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal. (Siti Kurnia dan Suharyati, 2010: 210)

Berdasarkan Undang-undang PPh Nomor 36 tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal adalah sebagai berikut :

1. Metode garis lurus (*Straight Line Method*) untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan.
2. Metode saldo menurun (*Declining Balance Method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus. (Sukrisno, 2012: 104)

Menurut Peraturan Perpajakan, penyusutan aset tetap dimulai pada saat tahun pengeluaran, untuk tahun 2000 dan sebelumnya (UU PPh Nomor 17 Tahun 1983). Sementara itu, untuk tahun 2001 (UU PPh Nomor 17 Tahun 2000) sampai dengan sekarang (UU PPh Nomor 36 Tahun 2008) penyusutan dimulai pada saat bulan pengeluaran aset tetap tersebut, kecuali apabila aset yang masih dalam proses pengerjaan, yaitu pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Dengan persetujuan Direktur jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan aset tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada bulan aset yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Tabel 1

Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan.

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun
1. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : UU No.36 Tahun 2008 Pasal 11

Tabel 2
Kelompok I Aktiva Tetap

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Semua Jenis Usaha	<p>1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</p> <p>2. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, <i>duplicator</i>, mesin fotokopi, <i>accounting machine</i>, dan sejenisnya.</p> <p>3. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi dan sejenisnya.</p> <p>4. Sepeda motor, sepeda dan becak.</p> <p>5. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>6. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman.</p> <p>7. <i>Dies</i>, <i>jigs</i> dan <i>mould</i>.</p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3.	Industri makanan dan Minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> dan sejenisnya.
4.	Perhubungan, Pergudangan, dan komunikasi	Mobil taksi, bus, truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5.	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester</i> , <i>write machine</i> , <i>bipolar test system</i> , <i>elimination pose cheker</i>

Tabel 3
Kelompok II Aktiva Tetap

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Semua Jenis Usaha	1. Mesin dan peralatan dari logam, termasuk meja, bangku, kursi, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. 2. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. 3. Komputer, <i>printer</i> , <i>scanner</i> , dan sejenisnya. 4. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> , dan sejenisnya. 5. <i>Container</i> dan sejenisnya
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	1. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanam, penanam benih, dan sejenisnya 2. Mesin yang mengelolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
3.	Industri makanan dan Minuman	1. Mesin yang mengelolah bahan asal binatang, unggas dan perikanan. Misalnya pabrik susu dan pengalengan ikan 2. Mesin yang mengubah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, biji-bijian, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengelola biji-bijian. 3. Mesin yang mengelola/menghasilkan minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. 4. Mesin yang menghasilkan/mengelola makanan makanan segala jenis

4.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan, misalnya mesin jahit, dan pompa air
5.	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebang kayu
6.	Konstruksi	Peralatan yang digunakan seperti truk berat, truk <i>drump</i> , <i>crane bulldozer</i> , dan sejenisnya
7.	Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi	1. Truk kerja pengangkutan dan bongkar muat 2. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang 3. Kapal yang dibuat khusus sebagai kapal suar dan pemadam kebakaran 4. Perahu layar yang beratnya sampai 250 DWT 5. Kapal Balon
8.	Telekomunikasi	1. Perangkat telepon 2. Pesawat telegrap, termasuk pesawat pengirim
9.	Industri semi konduktor	<i>Auto frame leader, aoutomatic logic handler etc.</i>

Tabel 4

Kelompok III Aktiva Tetap

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Pertambangan selain minyak	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengelola produk perikanan
2.	Pemintalan, pertenunan, dan pencelupan	1. Mesin yang mengelola produk tekstil. 2. Mesin untuk <i>yarm preparation</i>
3.	Perkayuan	1. Mesin yang mengelola produk-produk kayu barang-barang dari jerami. 2. Mesin dan peralatan pengrajin kayu.

4.	Industri Kimia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin yang mengelola produk industri kimia dan yang berhubungan dengan bahan kimia. 2. Mesin yang mengelola produk kimia lainnya seperti dammar tiruan
5.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin berat dan menengah
6.	Perhubungan dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang 2. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal 3. Dok terapung 4. Perahu layar pakai atau tanpa motor sampai 250 DWT 5. Pesawat terbang dan helikopter sejenisnya
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

Tabel 5

Kelompok IV Aktiva Tetap

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Perhubungan dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokomotif UAP dan tender atas rel 2. Lokomotif listrik atas rel 3. Lokomotif atas rel lainnya 4. Kereta, gerbong penumpang dan barang termasuk container 5. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang

		6. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal 7. Dok-dok terapung
--	--	--

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK 03/2002

Menurut Marisi (2009:183), tata cara perhitungan penyusutan fiskal atas jenis-jenis harta tersebut diatur sebagai berikut :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut mulai berlaku pada tahun pajak/tahun 2002.
- b. Atas jenis-jenis harta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut yang telah dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan sejak sebelum tahun pajak/tahun buku 2002, perhitungan penyusutan fiskal sampai dengan tahun pajak/tahun buku 2001 menggunakan tarif penyusutan kelompok 3.
- c. Perhitungan penyusutan fiskal atas harta dimaksud pada butir 2 mulai tahun pajak/tahun buku 2002 menggunakan tarif penyusutan kelompoknya yang baru (kelompok 1 dan kelompok 2) dengan metode penyusutan/dasar penyusutan yang tetap sama yaitu :
 - 1) Metode garis lurus, dasar penyusutan adalah harta perolehan.
 - 2) Metode saldo menurun, dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal.
- d. Masa manfaat yang tersisa atas harta dimaksud pada butir 2 setelah perpindahan dari kelompok 3 kedalam kelompok 1 atau kelompok 2 akan mengalami penyesuaian otomatis karena beban penyusutan yang semakin besar. Khusus untuk harta yang disusutkan dengan metode saldo menurun, masa manfaat yang tersisa dalam :

- 1) Kelompok 1, akan berakhir paling lama pada tahun keempat sejak tahun pajak/tahun buku 2002 (nilai sisa buku fiskal disusutkan sekaligus).
- 2) Kelompok 2, akan berakhir paling lama pada tahun kedelapan sejak tahun pajak/tahun buku 2002 (nilai sisa buku fiskal disusutkan sekaligus).

Adapun Ketentuan Penyusutan Fiskal adalah sebagai berikut :

- a) Penyusutan fiskal dimulai pada bulan pengeluaran atau pada bulan selesai pengerjaannya kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dapat dimulai sejak harta tersebut digunakan atau menghasilkan.
- b) Dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan tidak dikurangi nilai residu
- c) Mulai tahun 2001 dilakukan dalam bulan penuh, dilakukan penjenis aktiva tetap dilampirkan dalam SPT, PPh dengan lampiran khusus (e-SPT PPh).
- d) Penyusutan fiskal harta berwujud kelompok bangunan hanya boleh dengan metode garis lurus.
 - Permanen sebesar 5% pertahun.
 - Tidak permanen sebesar 10% pertahun
- e) Penyusutan fiskal harta berwujud bukan kelompok bangunan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun, WP hanya boleh memilih satu metode, perubahan metode penyusutan fiskal harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

- f) Penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun pada akhir masa manfaat nilai buku fiskalnya disusutkan sekaligus.
- g) Metode dan tarif penyusutan fiskal.
- h) Kelompok harta bangunan dan bukan bangunan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Perlakuan Pajak Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva.

Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Berdasarkan PSAK 16 (2009) dalam model revaluasi, suatu aktiva tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Menurut Mardiasmo (2008:157) Selisih lebih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali, terlebih dahulu dapat dikompensasikan dengan kerugian fiskal tahun berjalan. Jika masih terdapat sisa lebih, dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Atas selisih penilaian kembali aktiva tetap setelah dilakukan kompensasi kerugian, dikenakan PPh final sebesar 10%.

Kompensasi kerugian fiskal tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun dalam tahun pajak dilakukannya penilaian kembali terhadap penghasilan kena

pajak dari keuntungan usaha dan sumber lainnya. Apabila kondisi keuangan wajib pajak tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pajak penghasilan yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Waluyo,2010:130-131)

2.5 Perbedaan Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan.

Perbedaan utama antara Akuntansi dengan Undang-Undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur. Terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan yaitu :

1. Aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil.
2. Aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan.

(Waluyo,2010: 103)

Dengan demikian harta yang dimiliki perusahaan tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan karena tidak memenuhi syarat diatas, tidak boleh disusutkan. Apabila terjadi penjualan, maka laba atau rugi dihitung dengan mengurangkan harga perolehan terhadap harga jual.

Berikut ini merupakan perbedaan mendasar antara perlakuan menurut Akuntansi dengan Perpajakan berkaitan dengan aset tetap:

Tabel 6

Perbedaan Pelakuan Akuntansi dan Perpajakan

No	Uraian	Akuntansi	Perpajakan
1.	Saat dimulainya penyusutan	Penyusutan dimulai pada saat aset siap untuk digunakan	<p>a. Penyusutan dimulai sejak bulan timbulnya pengeluaran atas perolehan harta.</p> <p>b. Penyusutan dimulai sejak bulan selesainya pengerjaan harta (untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan).</p> <p>c. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, WP dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.</p>
2.	Perhitungan jumlah bulan sejak dimulainya penyusutan.	Jumlah bulan dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah. Misalnya pembelian diatas tanggal 15 dibulatkan ke bawah dan belum diakui penyusutannya.	Jumlah bulan selalu dibulatkan ke atas, walaupun dibeli di atas tanggal 15 setiap bulannya.

3.	Metode penyusutan	<p>a. Metode garis lurus</p> <p>b. Metode saldo menurun</p> <p>c. Metode jumlah unit</p> <p>WP dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai dan diterapkan secara konsisten.</p> <p>Metode penyusutan harus di-<i>review</i> minimum setiap akhir tahun buku.</p>	<p>a. Kelompok bangunan harus menggunakan metode garis lurus.</p> <p>b. Kelompok selain bangunan boleh menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun asalkan diterapkan secara taat asas.</p>
4.	Nilai residu	Nilai residu harus di- <i>review</i> minimum setiap akhir tahun buku.	Tidak mengakui adanya nilai residu.
5.	Aset yang boleh disusutkan	Semua aset tetap yang dimiliki badan usaha, kecuali tanah.	Hanya yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final.
6.	Sistem penyusutan	Penyusutan secara individual, kecuali untuk peralatan kecil (<i>small tools</i>), boleh secara golongan.	<p>a. Penyusutan individual.</p> <p>b. Penyusutan gabungan/ grup.</p>
7.	Penentuan masa manfaat	Tergantung pada justifikasi manajemen dan ditelaah ulang secara periodik.	Sudah diatur dalam KMK
8.	Harga perolehan	Untuk transaksi pertukaran aset menggunakan harga wajar.	Untuk transaksi tukar menukar dihitung berdasarkan harga pasar.
9.	Biaya perbaikan yang dikapitalisir,	Disusutkan sesuai masa manfaat yang ditinjau ulang, dalam hal ini nilai buku dan	Disusutkan terpisah dari harta lamanya, seolah-olah seperti harta dengan masa manfaat baru sehingga

	yang menambah masa manfaat aset lamanya.	biaya perbaikan akan disusutkan selama sisa masa manfaat ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan.	akan menjadi lebih lama pembebanannya.
--	--	--	--

Sumber : Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, (2009:111)

2.6 Penyajian Aktiva Tetap dalam Neraca

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan menurut Carl (2005) sehubungan dengan penyajian aktiva tetap di neraca:

- Dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan dalam neraca.
- Aktiva tetap yang digadaikan harus jelas.
- Jumlah akumulasi depresiasi dan biaya depresiasi untuk tahun ini harus ditunjukkan dalam laporan keuangan.
- Metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- Aktiva tetap harus dipecahkan kedalam golongan yang terpisah jika jumlahnya relatif material.
- Aktiva tetap yang sudah habis didepresiasi namun masih digunakan untuk beroperasi jika jumlah materialnya harus dijelaskan.

Aktiva tetap didalam neraca disajikan tersendiri, terpisah dari jenis aktiva yang lain, jika aktiva yang dimiliki terdiri dari beberapa pos, maka penyajiannya berdasarkan sifat permanennya. Dalam laporan keuangan, aktiva tetap dirinci menurut jenisnya seperti tanah, kendaraan dan lain-lain. Akumulasi penyusutan

disajikan sebagai pengurangan terhadap aktiva tetap baik secara tersendiri menurut jenisnya atau keseluruhan, dan ada baiknya dibuat rincian harga perolehan masing-masing penyusutannya. Metode penyusutan yang dianut oleh perusahaan perlu dijelaskan dalam laporan keuangan.

Tabel 7
Penyajian Aktiva Tetap dalam Neraca

Aktiva			
<i>Aktiva lancar</i>			
Kas		xxx	
Surat-surat berharga		xxx	
Piutang		xxx	
Persediaan		<u>xxx</u> +	
<i>Jumlah aktiva lancar</i>			xxx
<i>Aktiva tetap</i>			
Tanah		xxx	
Bangunan	xxx		
Akumulasi penyusutan	<u>(xxx)</u>		
Nilai buku		xxx	
Mesin dan alat	xxx		
Akumulasi penyusutan	<u>(xxx)</u>		
Nilai buku		xxx	
Perabot	xxx		
Akumulasi penyusutan	<u>(xxx)</u>		
Nilai buku		<u>xxx</u> +	
<i>Jumlah aktiva tetap</i>			<u>xxx</u> +
JUMLAH AKTIVA			xxx

Sumber : Zaki Baridwan, Intermediate Accounting,(2004:27)

2.7 Koreksi terhadap Perhitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal karena Perbedaan Penerapan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap.

Menurut Agoes (2012 : 218), Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dengan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/koreksi terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

2.7.1 Koreksi Fiskal

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006: 421) “ koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut Ketentuan Perpajakan.” Perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, karena tidak semua ketentuan dalam standar akuntansi keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan standar akuntansi keuangan. Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca atau laporan laba rugi.

2.7.2 Faktor-Faktor Penyebab Koreksi Fiskal.

Menurut Resmi (2009:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1. Perbedaan prinsip akuntansi.

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis tetapi tidak diakui dalam fiskal.

2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi.

- a. Metode penilaian persediaan.
- b. Metode penyusutan dan amortisasi.
- c. Metode penghapusan piutang.

3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
- c. Perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - Kerugian suatu usaha diluar negeri.
 - Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.

4. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan

bruto, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga dalam SPT Tahunan PPh, merupakan koreksi fiskal positif. Contoh: diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2.7.3 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal.

1. Beda Tetap (*Permanent Differences*).

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Sehingga akan mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*Pre Tax Income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*Taxable Income*).

2. Beda Waktu (*Timing Differences*).

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial tapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Biasanya perbedaan ini bersifat sementara. Perbedaan ini, diakibatkan oleh perbedaan metode dalam hal: Akrua dan realisasi, Penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, Penilaian persediaan, dan Kompensasi kerugian fiskal.

Koreksi atas beda waktu akan menyebabkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif tergantung metode yang digunakan. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.

2.7.4 Koreksi Fiskal Positif.

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat.

Menurut Muljono (2006), Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, sehingga akan mengakibatkan penambahan penghasilan. Adapun transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi positif antar lain:

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara pendapatan.
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut Wajib Pajak lebih tinggi.
- d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

Menurut Agoes (2012:219), koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2.7.5 Koreksi Fiskal Negatif.

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutanganya juga akan menurun.

Menurut Muljono (2006), Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang terjadi karena adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, sehingga mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:

- a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti: Penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

2.8 Pajak Menurut Pandangan Islam

Secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab yaitu *Dharibah*, yang artinya, mewajibkan, membebankan, menetapkan. Sedangkan menurut istilah, pajak (*dharibah*) merupakan beban tambahan yang dipikulkan kepada kaum Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri, yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber-sumber utama maupun sumber pendapatan sekunder lainnya (Gusfahmi,2007:27-31)

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah* berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dalam sistem ekonomi konvensional (Non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah pajak (*Tax*), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Soemitra atau Prof. Adriani. Pajak (*Tax*) disini maknanya adalah sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain-lain. Jadi, pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. (Gusfahmi, 2007:29)

Pajak berbeda dengan zakat yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintahnya. Pajak sendiri diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara Syar'i zakat berarti kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang sudah *nishab* (batas minimal tertentu) dan haul (dalam waktu tertentu) dalam hal ini zakat *maal* dengan maksud mensucikan diri dan mengharapkan berkah, ridha dan pahala Allah SWT.

Di dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 29 terdapat ayat yang berhubungan dengan pajak :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk ”.

Menurut Gusfahmi (2007:34-35), ada beberapa ketentuan tentang pajak (*Dharibah*) menurut syariat islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (Non-Islam), yaitu:

- 1) Pajak (*Dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang

membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut non-islam adalah abadi (selamanya).

- 2) Pajak (*Dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3) Pajak (*Dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non muslim. Sedangkan teori pajak non-islam tidak membedakan muslim dan non muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- 4) Pajak (*Dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
- 5) Pajak (*Dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 6) Pajak (*Dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kampar. Sesuai dengan Surat Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum No.03 Tahun 1984 mengelola sarana penyediaan air bersih yang telah berfungsi, dibentuk Badan Pengelola Air Minum. Pada Tahun 1998 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.16/Kpts/1988 tanggal 11 Januari 1988 dibentuk badan pengelola sarana penyediaan air bersih. DATI II Kampar termasuk Bangkinang. Pada Tahun 1992 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Bo.759/Kpts/1992 pengelolaan penyedia sarana air bersih yang ada di DATI I Provinsi Riau diserahkan dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Riau. Selanjutnya dari TK.I Riau pengelolaan sarana air bersih yang ada di DATI II Kampar diserahkan kepada Pemda DATI II sesuai dengan Keputusan Gubernur No.Kpts.II/I/93 pada Tanggal 09 Januari 1993.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar dibentuk berdasarkan SK Gubernur No.Kpts./II/I/1993 tanggal 09 Januari 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 1992.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar pada awalnya sudah melayani penyediaan air bersih dalam 4 kota yaitu, Air Tiris, Lipat Kain dan Ujung Batu dengan kapasitas terpasang 201/dt, jumlah pelanggan 700 sambungan

rumah dan pada akhir Desember 2000, PDAM Tirta Kampar mampu melayani kebutuhan air bersih di 12 Kota yaitu, Ibu Kota Kabupaten, Air Tiris, Lipat Kain, Ujung Batu, Pasir Pengarayan, Teratak Buluh, Sorek 1, Langgam, Dalu-dalu, Pangkalan Kerinci, Kuok dengan kapasitas 1011/dt dengan jumlah sambungan 2.500 air bersih yang diproduksi oleh PDAM Tirta Kampar berasal dari Sungai Kampar, Sungai Songsang dan Mata Air.

3.2 Visi, Misi dan Motto Perusahaan

1. Visi PDAM Tirta Kampar.

“ Menjadikan PDAM Tirta Kampar sebagai sumber air bersih masyarakat yang mandiri dan ekonomis dengan tetap mengutamakan aspek sosial”.

2. Misi PDAM Tirta Kampar.

- a) Untuk melakukan terhadap perbaikan Administrasi Perusahaan.
- b) Meningkatkan sistem pengolahan keuangan Perusahaan.
- c) Melakukan optimalisasi operasional usaha secara efektif dan efisien.

3. Motto PDAM Tirta Kampar.

“ Memberikan Pelayanan Air Bersih kepada Masyarakat”.

3.3 Aktivitas Perusahaan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar Bangkinang adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan sesuai dengan nilai-nilai atau syarat-syarat kesehatan dan bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat atau penduduk yaitu dengan cara menyalurkan air bersih

kerumah penduduk, tempat usaha dan fasilitas umum yang membutuhkan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk memajukan fungsi sosial. System penyaluran air bersih tersebut selain menggunakan instalasi air (pipa), juga menggunakan armada dalam bentuk mobil tangki, sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersedia jaringan instalasi perpipaannya.

Pada dasarnya PDAM merupakan produk jasa yang menyediakan air bersih bagi masyarakat. Karena merupakan Perusahaan jasa, ada beberapa hal yang dilakukan oleh PDAM dalam memberikan pelayanan jasa air bersih, yaitu :

- a. Membangun, memelihara, dan menjalani operasi sumber-sumber produksi dan sarana penyediaan air minum.
- b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata.
- c. Mengadakan suatu peraturan/ketentuan untuk mencegah adanya penyambungan secara liar.

PDAM Tirta Kampar selalu berusaha meningkatkan pelayanan dengan tetap mempertahankan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, PDAM berusaha untuk meningkatkan aktivitas perusahaan dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemandirian PDAM Tirta Kampar melalui pemanfaatan potensi yang ada.
- b. Melakukan sosialisasi program dan aktivitas perusahaan.
- c. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan untuk memperoleh profitabilitas yang optimal.

3.4 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar

Berdasarkan dari Struktur Organisasi PDAM Tirta Kampar, Maka berikut ini akan dijelaskan satu persatu dari yang terlibat dalam operasional PDAM Tirta Kampar sebagai berikut :

1. Direktur Utama.

Direktur Utama PDAM Tirta Kampar membawahi Direktur Umum dan Direktur Operasional mempunyai tugas-tugas yaitu mempunyai wewenang, mengangkat, memutasikan, mempromosikan, membina dan memberikan sanksi serta memberhentikan semua pegawai PDAM dibawah Direksi, menyampaikan dan bertanggung jawab atas laporan berkala mengenai semua kegiatan PDAM kepada Bupati melalui Badan Pengawas, serta mengadakan koordinasi, konsultasi dan tindakan-tindakan dengan pemerintah maupun swasta dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan PDAM.

2. Kepala Bagian Umum.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas-tugas yaitu mencatat, menyimpan, mengamankan dan memelihara dokumen perusahaan, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian dan kesekretariatan serta rumah tangga, mempersiapkan laporan berkala dan berkordinasi dengan bagian lainnya.

3. Kepala Bagian Keuangan.

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas-tugas yaitu merencanakan sumber-sumber pendapatan serta pengeluaran PDAM, menyusun rencana pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang, serta membuat laporan

keuangan secara periodik dan menyusun rencana anggaran PDAM dengan berkoordinasi dengan bagian lainnya.

4. Kepala Bagian Produksi.

Kepala Bagian Produksi mempunyai tugas-tugas yaitu mengelola sarana prasarana air baku, menjaga dan mengawasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air yang diproduksi, serta menyusun program pemeliharaan perawatan alat produksi.

5. Kepala Bagian Distribusi.

Kepala Bagian Distribusi mempunyai tugas-tugas yaitu membuat peta jaringan perpipaan, menanggulangi keluhan pelanggan, melakukan pemasangan sambungan baru rumah pelanggan, pembersihan rutin terhadap sistem jaringan pipa.

6. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan.

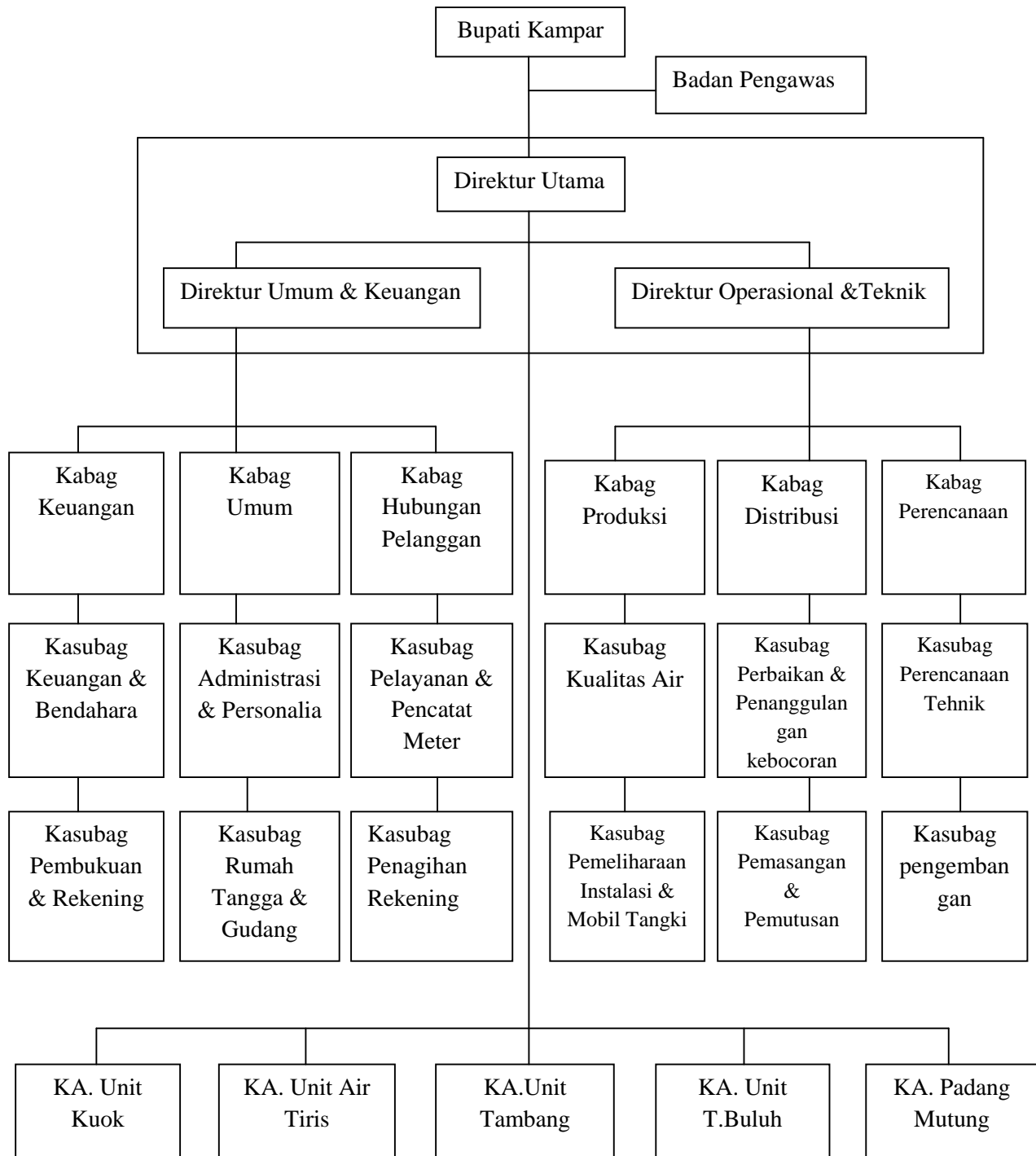
Kepala Bagian Hubungan Pelanggan mempunyai tugas-tugas yaitu melakukan koordinasi dengan kepala unit dalam perencanaan, peningkatan pemasaran dan pelayanan langganan termasuk penyuluhan, menyusun usulan kebijakan dan kebutuhan baru mengenai tarif air dan tarif sambungan baru, mencatat meter air dan menerima pengaduan pelanggan, serta merekomendasikan penyambungan kembali aliran yang putus.

7. Kepala Bagian Perencanaan.

Kepala Bagian Perencanaan mempunyai tugas-tugas yaitu merencanakan dan pengendalian program kerja, membuat laporan operasional bulanan, mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan yang ada.

Gambar 1

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai penerapan kebijaksanaan akuntansi aktiva tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka pokok permasalahan meliputi:

1. Pengelompokkan harta berwujud.
2. Lamanya penyusutan.
3. Perbandingan penyusutan aktiva.

Untuk lebih jelasnya uraian terperinci dan lengkap terhadap pembahasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

4.1 Pengelompokkan Harta Berwujud.

Pada dasarnya laporan keuangan untuk menyajikan keuangan pada perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disajikan harus menunjukkan nilai wajar dan benar. Kesalahan yang terjadi dalam perlakuan akuntansi aktiva tetap akan membawa pengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan, oleh sebab itu perlakuan aktiva tetap harus sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Peraturan Perpajakan.

Aktiva tetap disajikan sebelah debet secara berurut sesuai dengan sifat permanennya yaitu dimulai dari aktiva yang paling lama umurnya atau masa manfaatnya sampai kepada aktiva yang paling singkat masa manfaatnya.

Penyajian aktiva tetap dimulai dari tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin dan inventaris kantor, akumulasi penyusutan dari aktiva tetap disajikan sebagai pengurang nilai aktiva tetap. Metode penyusutan yang digunakan untuk beban penyusutan perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam perpajakan penyajian aktiva tetap dikelompokkan berdasarkan golongan I, golongan II, golongan III, golongan bangunan dan golongan bukan bangunan. Akuntansi komersial mengelompokkan aset berdasarkan masa manfaat.

Penyajian aktiva tetap yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar tidak dipisahkan. Perusahaan melaporkan nilai perolehan semua jenis aktiva dikurangi akumulasi penyusutannya dalam kelompok aktiva tetap. Nilai perolehan aktiva tetap sebesar Rp.6.390.596.969,64, nilai buku Rp.1.862.403.658,47 dan akumulasi penyusutan aktiva tetap Rp. 4.528.193.311,17. Penyajian tersebut akan menimbulkan kekeliruan bagi para pembaca untuk mengetahui jenis-jenis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan nilai buku setiap jenis aktiva tersebut.

Penyajian aktiva tetap tersebut dalam neraca agar tidak menimbulkan kekeliruan bagi para pembaca laporan keuangan maka setiap jenis aktiva tetap harus dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan akumulasi penyusutan disajikan sebagai unsur pengurang atas harga perolehan, sehingga nilai buku setiap aktiva tetap dapat dilihat langsung dalam neraca.

Tabel 8
Laporan Neraca
Per 31 Desember 2011

AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
1. Kas dan Bank	xxx	
2. Piutang rekening air	xxx	
Akumulaasi piutang rek.air	(xxx)	
Piutang rekening air bersih	xxx	
3. Piutang rekening non air	xxx	
Akumulasi piutang non rek.Air	(xxx)	
4. Piutang lain-lain	xxx	
5. Persediaan	xxx	
6. Uang muka kerja	xxx	
JUMLAH AKTIVA LANCAR		xxx
AKTIVA TETAP		
7. Nilai perolehan	xxx	
Akumulasi penyusutan aktiva tetap	(xxx)	
NILAI BUKU		xxx
AKTIVA LAIN-LAIN		
8. Aktiva yang belum digunakan	xxx	
9. Aktiva dalam pelaksanaan	xxx	
10. Bahan instalasi	xxx	
11. Aktiva tidak berfungsi	xxx	
Akumulasi aktiva tidak berfungsi	(xxx)	
Nilai buku aktiva tidak berfungsi	xxx	
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN		xxx
JUMLAH AKTIVA		xxx

Sumber : laporan keuangan PDAM

Laporan Neraca

Per 31 Desember 2011

AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
12. Kas dan Bank	xxx	
13. Piutang rekening air	xxx	
Akumulaasi piutang rek.air	<u>(xxx)</u>	
Piutang rekening air bersih	xxx	
14. Piutang rekening non air	xxx	
Akumulasi piutang non rek.Air	<u>(xxx)</u>	
15. Piutang lain-lain	xxx	
16. Persediaan	xxx	
17. Uang muka kerja	<u>xxx</u>	
JUMLAH AKTIVA LANCAR		xxx
AKTIVA TETAP		
18. Kelompok I	xxx	
Ak. Penyusutan kelompok I	<u>(xxx)</u>	
Nilai buku		xxx
19. Kelompok II	xxx	
Ak.penysutan kelompok II	<u>(xxx)</u>	
Nilai buku		xxx
20. Kelompok III	xxx	
Ak. Penyusutan kelompok III	<u>(xxx)</u>	
Nilai buku		xxx
21. Bangunan	xxx	
Ak.penysutan bangunan	<u>(xxx)</u>	
Nilai buku		xxx
AKTIVA LAIN-LAIN		
22. Aktiva yang belum digunakan	xxx	
23. Aktiva dalam pelaksanaan	xxx	
24. Bahan instalasi	xxx	
25. Aktiva tidak berfungsi	xxx	
Akumulasi aktiva tidak berfungsi	<u>(xxx)</u>	
Nilai buku aktiva tidak berfungsi	xxx	
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN		<u>xxx</u>
JUMLAH AKTIVA		xxx

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan (depresiasi) merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Pengelompokan harta berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu: (Pasal 11 ayat 6 UU PPh No 36 Tahun 2008)

1. Harta berwujud yang bukan berupa bangunan, terdiri dari empat kelompok, yaitu:

- a) Kelompok 1 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
- b) Kelompok 2 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
- c) Kelompok 3 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun.
- d) Kelompok 4 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

2. Harta berwujud yang berupa bangunan, dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Permanen : masa manfaatnya 20 tahun.
- b) Tidak permanen : bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode garis lurus (*straight line method*) adalah metode yang digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun (*declining*

balance method) adalah metode yang digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. (Mardiasmo:2009:153)

Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan.

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun
1. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : UU No.36 Tahun 2008 Pasal 11

4.2 Lamanya Penyusutan.

Pada daftar penyusutan aktiva tetap perusahaan membeli satu unit *mobiler kantor* pada Tahun 2003 dengan harga Rp.3.491.000 dengan tarif penyusutan 25%. Masa manfaat 4 tahun dan masa pemakaian 9 tahun. Nilai buku per 31 Desember 2011 adalah Rp.330.975. Perhitungan biaya penyusutan oleh perusahaan adalah :

Harga perolehan <i>mobiler kantor</i>	: Rp. 3.491.000
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2011	: Rp. (872.750)
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2010	: <u>Rp.(2.287.275)</u>
Jadi nilai buku per 31 Desember 2011	: Rp. 330.975

Masa manfaat *Mobiler Kantor* adalah 4 tahun dan masa pemakaian 9 tahun sehingga sisa manfaatnya adalah 0. Dalam perhitungan beban penyusutan dan penyajian aktiva tetap, perusahaan menghitung nilai buku pada Per tahun 2011 adalah Rp.330.975. Sehingga disaat berakhirnya umur ekonomis atau masa manfaat aktiva tersebut, nilai buku aktiva yang disajikan Rp.330.975.

Biaya penyusutan seharusnya yang dibuat oleh perusahaan yaitu:

Harga perolehan <i>mobiler kantor</i>	: Rp. 3.491.000
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2011	: Rp. (872.750)
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2010	: <u>Rp.(2.618.250)</u>
Jadi nilai buku per 31 Desember 2011	: Rp 0

Untuk aktiva tetap yang sudah habis masa manfaatnya tetapi masih digunakan dalam operasi normal perusahaan, seharusnya perusahaan menyajikan nilai buku aktiva tetap tersebut sebesar Rp.1. Jika perusahaan sudah tidak mengakuinya sebagai aset sebaiknya dihapus dari aktiva tetap, sehingga perusahaan tidak perlu lagi menghitung beban penyusutan untuk periode berjalan. Jadi apabila masa manfaat aktiva tetap sudah habis, perusahaan tidak boleh lagi menyusutkan aktiva tetap tersebut karena dapat menyebabkan laba berkurang dan pajak terutang perusahaan juga berkurang.

4.3 Perbandingan Penyusutan Aktiva.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar dalam menghitung beban penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Perusahaan dalam

melakukan perhitungan dan tarif penyusutan aktiva tetap masih menggunakan Undang-Undang lama yaitu UU No.10 tahun 1994. Perhitungan golongan dan tarif berdasarkan Peraturan Perpajakan No.10 Tahun 1994 sebagai berikut :

- a. Golongan I, alat-alat pengangkutan dan perhubungan, disusutkan sebesar 25% dari harga perolehan dengan masa manfaat 4 tahun.
- b. Golongan II, alat pembangkit listrik, instalasi perpompaan, saluran distribusi/pipa, meter air, perlengkapan kantor, alat-alat pergudangan dan instalasi umum lainnya disusutkan sebesar 12,5% dari harga perolehan dengan masa manfaat 8 tahun.
- c. Golongan III, instalasi pengolahan, resevoir, tangki air, saluran transmisi disusutkan sebesar 6,25% dari harga perolehan dengan masa manfaat 16 tahun.
- d. Golongan Bangunan :
 - 1) Bangunan permanen, disusutkan sebesar 5% dari harga perolehan dengan masa manfaat 20 tahun.
 - 2) Bangunan semi permanen, disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan dengan masa manfaat 10 tahun.

Dalam daftar aktiva tetap dapat dilihat bahwa kipas angin CMC Uchiba dan AC Panasonic 1 PK dimasukkan kedalam kelompok I, masa manfaat 4 tahun dan tarif penyusutannya 25%. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Perpajakan No.36 tahun 2008 Kipas Angin CMC Uchiba dan AC Panasonic 1 PK termasuk kelompok II, masa manfaatnya 8 tahun, dan tarif penyusutannya 12,5 %.

Kemudian Honda RX King dan Honda Jupiter Z dimasukkan oleh Perusahaan ke dalam kelompok II, masa manfaat 8 tahun dan tarif penyusutannya 12,5%. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Perpajakan No.36 tahun 2008 Honda RX King dan Honda Jupiter Z termasuk kelompok I, masa manfaatnya 4 tahun, dan tarif penyusutannya 25%. Akibat dari kesalahan tersebut mempengaruhi biaya penyusutan, penghasilan kena pajak dan hutang pajak pada akhir tahun.

Adapun besarnya pengaruh kesalahan pengelompokkan kipas angin CMC Uchiba adalah 56.250. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga kipas angin CMC Uchiba	Rp. 450.000
Biaya penyusutan yang dibuat oleh Perusahaan (Kelompok I)	
Sebesar 25% x Rp. 450.000	Rp. 112.500
Biaya penyusutan menurut Peraturan Perpajakan (Kelompok II)	
Sebesar 12,5% x Rp.450.000	<u>Rp. 56.250</u>
Kelebihan penyusutan	Rp. 56.250

Adapun besarnya pengaruh kesalahan pengelompokkan AC Panasonic 1 PK adalah Rp.437.500. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga AC Panasonic 1 PK	Rp. 3.500.000
Biaya penyusutan yang dibuat oleh Perusahaan (Kelompok I)	
Sebesar 25% x Rp. 3.500.000	Rp. 875.000
Biaya penyusutan menurut Peraturan Perpajakan (Kelompok II)	
Sebesar 12,5% x Rp.3.500.000	<u>Rp. 437.500</u>
Kelebihan penyusutan	Rp. 437.500

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui perbedaan biaya penyusutan kipas angin CMC Uchiba sebesar Rp.56.250 dan AC Panasonic 1 PK sebesar Rp.437.500, disebabkan penyusutan kipas angin CMC Uchiba menurut Peraturan Perpajakan sebesar Rp.56.250 dan penyusutan AC Panasonic 1 PK menurut Peraturan Perpajakan sebesar Rp.437.500, sedangkan biaya penyusutan kipas angin CMC Uchiba menurut Perusahaan adalah Rp.112.500 dan biaya penyusutan AC Panasonic 1 PK menurut Perusahaan adalah Rp.875.000. Perbedaan ini dikarenakan karena adanya perbedaan masa manfaat aktiva kelompok I dan kelompok II, yaitu 4 tahun (tarif 25%) dan 8 tahun (tarif 12,5%). Perbedaan tersebut akan mempengaruhi biaya penyusutan, penghasilan kena pajak kipas angin CMC Uchiba sebesar Rp.56.250 dan AC Panasonic 1 PK sebesar Rp.437.500.

Adapun besarnya pengaruh kesalahan pengelompokkan Honda RX King adalah Rp.812.500. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga Honda RX King	Rp.6.500.000
Biaya penyusutan yang dibuat oleh Perusahaan (Kelompok II)	
Sebesar 12,5% x Rp. 6.500.000	Rp. 812.500
Biaya penyusutan menurut Peraturan Perpajakan (Kelompok I)	
Sebesar 25% x Rp.6.500.000	<u>Rp.1.625.000</u>
Kekurangan penyusutan	Rp. 812.500

Adapun besarnya pengaruh kesalahan pengelompokkan Honda Jupiter Z adalah Rp.2.206.000. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga Honda Jupiter Z	Rp. 17.648.000
Biaya penyusutan yang dibuat oleh Perusahaan (Kelompok II)	
Sebesar 12,5% x Rp. 17.648.000	Rp. 2.206.000
Biaya penyusutan menurut Peraturan Perpajakan (Kelompok I)	
Sebesar 25% x Rp. 17.648.000	<u>Rp. 4.412.000</u>
Kekurangan penyusutan	Rp. 2.206.000

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui perbedaan biaya penyusutan Honda RX King sebesar Rp.812.500 dan Honda Jupiter Z sebesar Rp.2.206.000, disebabkan penyusutan Honda RX King menurut Peraturan Perpajakan sebesar Rp.1.625.000 dan penyusutan Honda Jupiter Z menurut Peraturan Perpajakan sebesar Rp.4.412.000, sedangkan biaya penyusutan Honda RX King menurut Perusahaan adalah Rp.812.500 dan biaya penyusutan Honda Jupiter Z menurut Perusahaan adalah Rp.2.206.00. Perbedaan ini dikarenakan karena adanya perbedaan masa manfaat aktiva kelompok I dan kelompok II, yaitu 4 tahun (tarif 25%) dan 8 tahun (tarif 12,5%). Perbedaan tersebut akan mempengaruhi biaya penyusutan, penghasilan kena pajak Honda RX King sebesar Rp.812.500 dan Honda Jupiter Z sebesar Rp.2.206.000.

Dari tabel berikut ini dapat terlihat selisih beban penyusutan kipas angin CMC Uchiba, AC Panasonic 1 PK, Honda RX King dan Honda Jupiter Z yaitu sebagai berikut :

Menurut UU No.10 Tahun 1994 (Perusahaan)

No	Jenis aktiva	Tarif penyusutan	Harga perolehan	Penyusutan
1.	Kipas Angin CMC Uchiba	25%	Rp.450.000	Rp.112.500
2.	AC Panasonic 1 PK	25%	Rp.3.500.000	Rp.875.000
3.	Honda RX King	12,5%	Rp.6.500.000	Rp.812.500
4.	Honda Jupiter Z	12,5%	Rp.17.648.000	Rp.2.206.000

Menurut UU No.36 Tahun 2008

No	Jenis aktiva	Tarif penyusutan	Harga perolehan	Penyusutan
1.	Kipas Angin CMC Uchiba	12,5%	Rp.450.000	Rp.56.250
2.	AC Panasonic 1 PK	12,5%	Rp.3.500.000	Rp.437.500
3.	Honda RX King	25%	Rp.6.500.000	Rp.1.625.000
4.	Honda Jupiter Z	25%	Rp.17.648.000	Rp.4.412.000

Selisih Biaya Penyusutan Menurut UU No.10 Tahun 1994 dan UU No.36 Tahun 2008

No	Jenis aktiva	UU No.10 Tahun 1994	UU No.36 Tahun 2008	Penyusutan
1.	Kipas Angin CMC Uchiba	Rp.112.500	Rp.56.250	Rp.56.250
2.	AC Panasonic 1 PK	Rp.875.000	Rp.437.500	Rp.437.500
3.	Honda RX King	Rp.812.500	Rp.1.625.000	(Rp.1.625.000)
4.	Honda Jupiter Z	Rp.2.206.000	Rp.4.412.000	(Rp.4.412.000)

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar, mengenai masalah perbandingan perhitungan penyusutan aktiva tetap, maka pada bab penutup ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil sehubungan dengan penelitian dan pembahasan tersebut. Selanjutnya dari hasil kesimpulan akan dikemukakan beberapa saran-saran yang berkemungkinan akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan dalam melakukan akuntansi aktiva tetap.

5.1 Kesimpulan

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan, dengan nilai aktiva yang cukup besar dan merupakan aset yang penting bagi perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.
2. Perusahaan ini dalam menghitung beban penyusutan aktiva tetapnya menggunakan metode garis lurus namun didalam daftar aktiva tetap perusahaan mengelompokkan jenis aktiva sesuai dengan Ketentuan Perpajakan UU No.10 tahun 1994, sedangkan Peraturan Perpajakan yang dipakai sekarang UU No.36 tahun 2008. Sehingga terjadi perbedaan dalam menentukan tarif penyusutannya yang dilakukan perusahaan dengan Peraturan Perpajakan sekarang.

3. Besarnya pengaruh kesalahan pengelompokkan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar terhadap aktiva tetap kipas angin CMC Uchiba sebesar Rp.56.250 dan AC Panasonic 1 PK adalah sebesar Rp.437.500. Hal ini menyebabkan terjadi kelebihan penyusutan yang dilakukan oleh Perusahaan. Kemudian Honda RX King sebesar Rp.812.500 dan Honda Jupiter Z sebesar Rp.2.206.000. Menyebabkan terjadinya kekurangan penyusutan yang dilakukan perusahaan yang akan mempengaruhi biaya penyusutan dan penghasilan kena pajak.
4. Penyajian aktiva tetap yang dilakukan perusahaan tidak dipisahkan. Perusahaan melaporkan nilai perolehan semua jenis aktiva dikurangi akumulasi penyusutan dalam kelompok aktiva. Penyajian tersebut akan membingungkan bagi para pembaca laporan keuangan, agar penyajian aktiva tetap tersebut tidak menimbulkan kekeliruan bagi pembaca laporan keuangan, maka setiap jenis aktiva tetap harus dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan akumulasi penyusutan disajikan sebagai unsur pengurang atas harga perolehan, sehingga nilai buku setiap aktiva tetap dapat dilihat langsung dalam neraca.
5. Dari segi masa manfaat, harga perolehan, maupun metode penyusutannya Baik metode komersial maupun fiskal bisa saja menghasilkan nilai yang berbeda. Hal ini disebabkan karena semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil pendapatan yang dihasilkan dan berarti semakin kecil pula pajak terutang yang harus dibayarkan, begitu juga sebaliknya. Diperlukan

koreksi fiskal atas penyusutan untuk mengetahui PPh yang harus dibayar secara tepat.

5.2 Saran

1. Mengingat Peraturan Perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perekonomian, diharapkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar mengikuti perkembangan tersebut. Dalam menghitung biaya penyusutan perusahaan seharusnya menggunakan metode yang dianut dalam Peraturan Perpajakan yang sekarang yaitu UU No.36 Tahun 2008.
2. Untuk menghitung besarnya penyusutan aktiva tetap hendaknya berdasarkan tahun, tanggal, dan bulan pada saat perolehan aktiva tetap dan disusutkan selama masa periode manfaatnya.
3. Untuk aktiva tetap yang sudah habis masa manfaat tetapi masih digunakan dalam operasi normal perusahaan seharusnya perusahaan menyajikan nilai buku aktiva tetap tersebut sebesar Rp.1. jika perusahaan sudah tidak mengakuinya sebagai aset sebaiknya dihapus dari daftar aktiva, sehingga perusahaan tidak perlu lagi menghitung beban penyusutan untuk periode berjalan.
4. Penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan sebaiknya setiap jenis aktiva tetap harus dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan akumulasi penyusutan disajikan sebagai unsur pengurang atas harga perolehan, sehingga nilai buku setiap aktiva dapat dilihat langsung dalam neraca.

5. Karena aktiva tetap merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam menyajikannya. Penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan agar laporan keuangan yang disajikan tidak menimbulkan kekeliruan apabila dibaca oleh pemakainya atau disebut wajar.
6. Agar perusahaan bisa melakukan perencanaan dan perhitungan pajak yang lebih baik dan hati-hati terutama pada biaya-biaya yang mempengaruhi pada perhitungan laba kena pajak penghasilan. Kemudian untuk aktiva tetap ada baiknya metode penyusutan, umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut disesuaikan dengan kelompok aktiva tetap dalam UU Perpajakan, untuk menghindari terjadinya koreksi atas biaya penyusutan aktiva tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat At Taubah Ayat 29.

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Agustinus, Sonny & Kurniawan, Isnianto. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Asyhadie, Zaeni. 2008. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Baridwan, Zaki, 2004, *Intermediate Accounting*, Edisi 7, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi -Gajah Mada,Yogyakarta.

Fidel. 2010. *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta : Murai Kencana.

Fitriandi, Primandita, Tejo Birowo, dkk. 2009. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT.Grafindo Persada.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Karyono. *Analisis Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT Astra Karya Pekanbaru*. 2011. Pekanbaru.

Laporan Keuangan Tahun 2011 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar. 2011.

Mardiasmo.2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo.2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Muljono, Djoko, Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. 2006. *Pemeriksaan Akuntansi*, Edisi Ketiga, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Marisi, Purba . 2009. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suharyati. 2010. *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahmat Ilahi. *Analisis Aktiva Tetap pada PT Riyantama Putra Anugrah Pekanbaru*. 2011. Pekanbaru.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Setiawan, Agus & Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soemarso. 2008. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan .*
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.